Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA
| p-ISSN: 3047-0153 | e-ISSN: 2962-1860 | DOI: 10.61860 | SINTA-2: 13890 |
Website: https://gemaperencana.id | Email: gemaperencana@gmail.com
Policy Paper

Urgency of Rector's Regulation on Industry Partnerships and Collaborative Curriculum for Graduate Competitiveness

Urgensi Peraturan Rektor Kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Kurikulum Kolaboratif demi Daya Saing Lulusan

Author's Name* : Ibnu Zamzam
Institution/University : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Corresponding Author's E-mail : ibnuzamzam@uinssc.ac.id

Article History	Received (September 5th, 2026)	Revised (October 25th, 2026)	Accepted (November 11th, 2026)

News Article

Keyword:

Co-Design Curriculum; Graduate Competitiveness; Business and Industrial World; Islamic Higher Education Institutions; Rector's Regulation; Skills Mismatch; Strategic Partnerships; UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;

Abstract

The rapid development of the digital economy has triggered a mismatch between higher education graduate qualifications and labor market needs (skills mismatch), resulting in high rates of structural graduate unemployment. At Islamic Higher Education Institutions (PTKI) such as UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, this phenomenon is driven by isolated curriculum designs, slow evaluation cycles, and weak legal frameworks for partnerships with the Business and Industrial World (DUDI), which tend to remain limited to formal commitments (paper-based agreements). This policy article aims to formulate the urgency of issuing a Rector's regulation to formalize curriculum collaboration (co-design) in order to enhance graduate competitiveness. Through a qualitative descriptive-evaluative methodology using the Urgency, Seriousness, Growth (USG) weighting technique and William N. Dunn's policy criteria scoring framework, the skills mismatch issue was identified as the top priority problem. The analysis shows that the lack of structured interaction within the Triple Helix Model and the adoption of Outcome-Based Education (OBE) that remains a mere administrative formality are the main root causes of the alumni competency gap. Therefore, it is concluded that internal policy intervention is urgent to bridge the gap between academia and industry by strengthening the strategic role of the Career Development Center (CDC) as a partnership facilitator and tracer study manager. It is recommended that the Rector of UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon issue a Rector's Regulation on Guidelines for Strategic Partnerships and Co-Design Curriculum with DUDI as a legal basis to mandate practitioner involvement in course syllabus (RPS) preparation facilitated by the CDC, formalize technical Cooperation Agreements (PKS), facilitate professional certification recognition, and provide certainty regarding credit transfer for structured internships (Co-Op Education).

Kata Kunci:

Co-Design Curriculum; Daya Saing Lulusan; Dunia Usaha dan Dunia Industri; Kemitraan Strategis; Peraturan Rektor; Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; *Skills Mismatch*; UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa pesatnya perkembangan ekonomi digital memicu ketidakselarasan antara kualifikasi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja (*skills mismatch*), yang berdampak pada tingginya angka pengangguran terstruktur sarjana. Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seperti UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, fenomena ini dipicu oleh rancangan kurikulum yang masih terisolasi, lambatnya siklus evaluasi, serta lemahnya payung hukum kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang cenderung sebatas komitmen formal (*paper-based agreement*). Artikel kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan urgensi penerbitan regulasi Rektor guna memformalkan kolaborasi kurikulum (*co-design*) demi meningkatkan daya saing lulusan. Melalui metodologi kualitatif berbasis analisis deskriptif-evaluatif dengan teknik pembobotan *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) dan kerangka skoring kriteria kebijakan William N. Dunn, isu skills mismatch teridentifikasi sebagai masalah prioritas utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan interaksi terstruktur dalam Triple Helix Model serta adopsi *Outcome-Based Education* (OBE) yang masih sebatas formalitas administratif menjadi akar masalah utama kesenjangan kompetensi alumni. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa intervensi kebijakan internal sangat mendesak untuk menjembatani jurang akademis dan industri melalui penguatan peran strategis *Career Development Center* (CDC) sebagai fasilitator kemitraan dan pengelola *tracer study*. Direkomendasikan kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemitraan Strategis dan *Co-Design Curriculum* Bersama DUDI sebagai payung hukum yang mewajibkan keterlibatan praktisi dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan difasilitasi oleh CDC, memformalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis, memfasilitasi rekognisi sertifikasi profesi, serta memberikan kepastian konversi SKS untuk magang terstruktur (*Co-Op Education*).

To cite this article: Ibnu Zamzam. (2026). "Urgency of Rector's Regulation on Industry Partnerships and Collaborative Curriculum for Graduate Competitiveness". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Volume 5 (2)*, September-December, 2026. Page: 75-102. DOI: https://doi.org/10.61860/jigp.v5i2.431

This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat ekonomi digital global telah mengubah lanskap dan kebutuhan pasar kerja secara fundamental. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut kualifikasi tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pemahaman teoretis konvensional, melainkan juga penguasaan teknologi digital terapan yang adaptif (Alhloul dan Kiss 2022). Fenomena ini menempatkan institusi pendidikan tinggi pada posisi krusial sebagai pemasok utama modal manusia (*human capital*) yang berkewajiban mencetak lulusan dengan kompetensi yang relevan terhadap tuntutan zaman (Sulistiawan 2025).

Namun, transisi menuju ekosistem digital nasional menghadapi kendala struktural berupa ketidakselarasan antara pasokan kualifikasi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan aktual pasar kerja (*skills mismatch*) (Ika Rezki Purnama dkk. 2026). Banyak

institusi pendidikan tinggi yang masih mempertahankan model pembelajaran konvensional dan berorientasi pada penyampaian teori abstrak (Hsu dan Malkin 2011). Akibatnya, terjadi kesenjangan signifikan antara capaian pembelajaran yang dihasilkan kampus dan profil kemampuan (*skillset*) yang dituntut oleh institusi bisnis modern (Bhardwaj 2026).

Masalah *skills mismatch* ini membawa dampak domino yang serius, terutama tercermin dari tingginya angka pengangguran terstruktur pada tingkat sarjana (Putra dkk. 2026). Ketika universitas meluluskan ribuan alumni setiap tahunnya tanpa dibekali kualifikasi digital terstandar, para lulusan tersebut mengalami kesulitan dalam menembus proses seleksi kerja di sektor industri bernilai tambah tinggi (Hambaly, Akbar, dan Adnyani 2026). Kondisi ini tidak hanya merugikan para alumni secara ekonomi, melainkan juga menciptakan inefisiensi investasi pendidikan tinggi di tingkat nasional.

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tantangan ketidakselarasan kompetensi ini terasa semakin kompleks. Rendahnya daya saing lulusan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memicu tingginya pengangguran akibat kurikulum yang inkompatibel. PTKI, termasuk UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, mengemban mandat ganda untuk mempertahankan nilai-nilai keilmuan keagamaan sekaligus merespons akselerasi kebutuhan industri digital modern (Pratiwi dkk. 2024). Penyesuaian peran ini menuntut adanya fleksibilitas kurikulum yang tinggi agar integrasi keilmuan Islam dan keterampilan teknologi praktis dapat berjalan secara harmonis.

Transformasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi kampus berbasis siber (*cyber university*) sejatinya merupakan langkah strategis untuk memperluas aksesibilitas dan literasi teknologi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (KMA No. 83 Tahun 2022). Namun, perubahan status instrumental ini tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan relevansi lulusan jika tidak diimbangi dengan perombakan substansi kurikulum secara mendasar (Saquin 2023). Infrastruktur siber hanyalah moda penyampaian, sedangkan kualitas kualifikasi lulusan sangat ditentukan oleh relevansi materi pembelajaran yang diajarkan.

Dalam struktur operasional universitas, Career Development Center (CDC) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memegang peran vital sebagai penghubung antara dunia akademik dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). CDC memiliki visi "Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan karir yang inovatif dan inklusif, menghasilkan lulusan siap kerja, berdaya saing global, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja di era digital." Untuk mencapai hal ini, CDC mengelola delapan program inti meliputi: (1) Seminar dan Pelatihan Karir, (2) Seminar dan Pelatihan Soft Skill, (3) Pencarian Kerja dan Rekrutmen, (4) Pameran dan Bursa Kerja (Job Fair), (5) Magang dan Kemitraan, (6) Konseling Karir, (7) Kewirausahaan, serta (8) Pelaksanaan Tracer Study.

Meskipun CDC telah menjalankan berbagai program strategis, temuan empiris Tracer Study menunjukkan tantangan nyata dalam transisi alumni ke dunia kerja. Data Tracer Study yang dikumpulkan secara berkala memberikan gambaran mengenai masa tunggu kerja, tingkat keterserapan alumni, kesesuaian bidang kerja, hingga besaran pendapatan awal. Evaluasi Tracer Study menegaskan bahwa tanpa adanya integrasi kurikulum yang padu dengan DUDI, program CDC dan skema magang sering kali terdegradasi menjadi formalitas administrasi tanpa bobot teknis yang optimal.

Akar masalah utama dari terjadinya kesenjangan kompetensi tersebut bersumber dari orientasi pengembangan kurikulum yang masih terisolasi dari realitas praktis lapangan kerja (Rianto dkk. 2022a). Kurikulum pada mayoritas program studi dirancang secara

internal berbasis perspektif akademis murni, tanpa melibatkan pemetaan kebutuhan nyata dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) secara langsung (Rianto et al., 2022). Kerangka perancangan seperti ini menghasilkan luaran pembelajaran yang teoretis namun miskin keterpakaian praktis.

Konsep *Outcome-Based Education* (OBE) sesungguhnya telah diamanatkan sebagai acuan perancangan kurikulum pendidikan tinggi modern untuk memastikan setiap luaran pembelajaran terukur secara eksplisit. Namun, dalam praktik penerapannya, adopsi OBE sering kali hanya berhenti pada tataran formalitas administratif. Penentuan indikator kinerja capaian pembelajaran jarang didasarkan pada analisis Jabatan Kualifikasi Kerja Nasional maupun standar industri yang berlaku di sektor DUDI.

Secara teoritis, keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja memerlukan interaksi yang erat melalui kerangka *Triple Helix Model* yang menghubungkan perguruan tinggi, industri, dan pemerintah (Ari Rizaludin 2025). Dalam ekosistem ini, pemerintah berperan menciptakan fasilitasi regulasi, industri menyediakan ruang praktik serta proyeksi kebutuhan kompetensi, sementara perguruan tinggi merespons melalui penyesuaian kurikulum. Tanpa berfungsinya ketiga elemen ini secara sinergis, kesenjangan kualifikasi tenaga kerja akan sulit diatasi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang memayungi kemitraan antara PTKI dan DUDI masih sangat lemah dan tidak mengikat. Belum tersedianya Peraturan Menteri Agama yang secara khusus menggariskan pedoman kemitraan strategis menyebabkan skema kerja sama antara kampus dan industri berjalan tanpa kepastian hukum dan tolok ukur kinerja yang jelas (Taufik dan Suprapto 2021). Kebanyakan kerja sama yang terbangun hanya bertumpu pada inisiatif informal pengelola program studi.

Kelemahan regulasi ini berdampak langsung pada bentuk kerja sama yang dihasilkan, di mana sebagian besar kemitraan kampus dengan DUDI terhenti pada penandatanganan Nota Kesepahaman (*MoU*) secara administratif (*paper-based agreement*). Kemitraan tersebut jarang ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerja Sama (*PKS*) teknis yang memuat agenda operasional, seperti perancangan kurikulum bersama (*co-design*), konsorsium riset terapan, maupun saluran penyerapan lulusan secara langsung (Murni 2024).

Selain ketiadaan pedoman regulatif yang tegas, belum tersedianya skema insentif resmi bagi sektor DUDI turut menjadi penghambat utama rendahnya partisipasi industri dalam ekosistem kampus. Pihak swasta maupun BUMN menganggap keterlibatan dalam perancangan kurikulum dan pendampingan akademis sebagai aktivitas berbiaya (*cost center*) yang menguras sumber daya tanpa memberikan imbal balik bisnis yang jelas (Palacios Fenech dkk. 2026). Tanpa adanya insentif fiskal atau regulatif dari pemerintah, DUDI cenderung enggan mengalokasikan praktisi terbaiknya untuk berpartisipasi aktif di kampus.

Dampak langsung dari tidak tersedianya insentif dan regulasi pembanding tersebut adalah minimnya keterlibatan praktisi DUDI dalam proses penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Diskusi peninjauan kurikulum masih didominasi oleh dosen internal yang berlatar belakang akademis murni (Supendi 2025). Akibatnya, studi kasus, penggunaan perangkat lunak (*software/tools*) industri terkini, serta dinamika tantangan bisnis aktual tidak terintegrasi ke dalam modul perkuliahan harian mahasiswa.

Identifikasi Masalah

1. Kesenjangan Antara Kurikulum Akademis dan Kebutuhan Industri Digital (Skills Mismatch). Kurikulum di perguruan tinggi keagamaan sering kali berfokus pada penguatan aspek teoretis dan keilmuan keagamaan dasar, sehingga kurang fleksibel dalam mengadopsi dinamika keterampilan teknis (hard skills) dan literasi digital yang dibutuhkan pasar kerja modern. Hal ini menyebabkan lulusan mengalami diskoneksi antara kompetensi yang dipelajari selama kuliah dengan ekspektasi profesional di industri (Agustiningsih 2025).
2. Minimnya Integrasi Keterampilan Abad Ke-21 dan Sertifikasi Kompetensi Terstandar. Proses pembelajaran belum sepenuhnya mengintegrasikan keterampilan abad ke-21—seperti pemecahan masalah kompleks (*complex problem solving*), pemikiran kritis, dan adaptabilitas teknologi—ke dalam skema pembelajaran praktis. Selain itu, lulusan sering tidak dibekali sertifikasi kompetensi industri yang diakui secara nasional maupun internasional, sehingga menurunkan nilai tawar (*bargaining position*) lulusan saat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi umum (Rasmawar, R. Madhakomala, dan Mayasari 2026).
3. Lemahnya Kemitraan Strategis Kampus dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Model kemitraan yang dibangun lembaga pendidikan sering kali sebatas kerja sama administratif (*paper-based agreement*) dan belum bermuara pada program riset bersama, *co-op education*, atau magang terstruktur berbasis kualifikasi industri. Akibatnya, CDC dan program studi kekurangan saluran langsung (career pipeline) untuk penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan di sektor DUDI (Aziz, Sahri, dan Bin Mohd Saufi 2025).

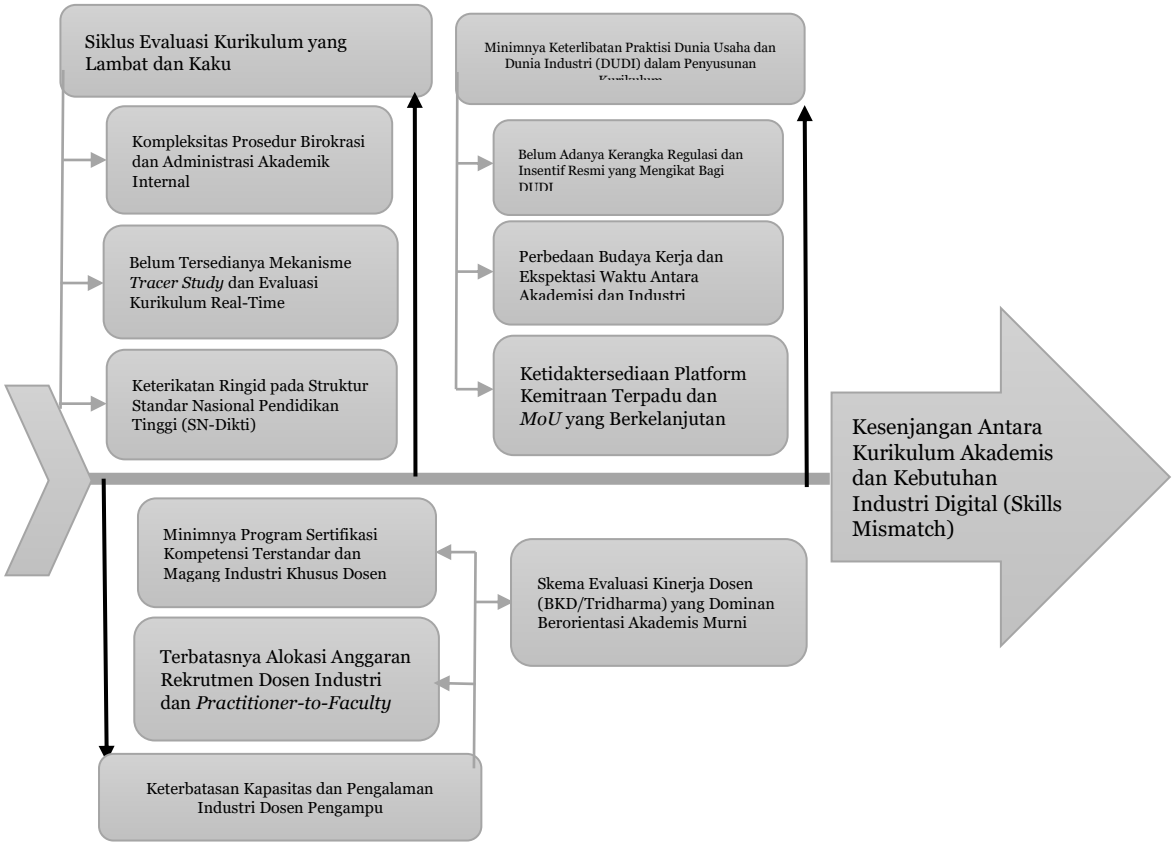
Berdasarkan masalah utama di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	**Kesenjangan Antara Kurikulum Akademis dan Kebutuhan Industri Digital (*Skills Mismatch*)**	**5**	**5**	**5**	**15**
2	Minimnya Integrasi Keterampilan Abad Ke-21 dan Sertifikasi Kompetensi Terstandar.	4	4	4	12
3	Lemahnya Kemitraan Strategis Kampus dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	4	5	4	13

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **1 [Kesenjangan Antara Kurikulum Akademis dan Kebutuhan Industri Digital (*Skills Mismatch*)]** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah "nomor 1 (Kesenjangan Antara Kurikulum Akademis dan Kebutuhan Industri Digital (Skills Mismatch))" dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Belum adanya kerangka regulasi dan insentif resmi bagi DUDI serta minimnya keterlibatan praktisi dalam perancangan pembelajaran mengakibatkan kesenjangan antara kurikulum akademis dengan kebutuhan industri digital (*skills mismatch*).

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Akar Masalah *Skills Mismatch*: Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakselarasan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi keagamaan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sektor industri digital.
2. Menilai Prioritas Masalah dan Alternatif Kebijakan: Mengevaluasi urgensi permasalahan kurikulum serta menguji efektivitas berbagai alternatif intervensi kebijakan tata kelola akademik di perguruan tinggi.
3. Merumuskan Payung Hukum Kemitraan Strategis: Menyusun rekomendasi substansial bagi penerbitan regulasi tingkat Rektor yang dapat memformalkan skema perancangan kurikulum kolaboratif (*co-design curriculum*) antara kampus dan industri.
4. Memperkuat Integrasi Pembelajaran Teraplikasi: Mendorong pembentukan kerangka kerja akademis yang memfasilitasi pelaksanaan magang terstruktur,

rekognisi sertifikasi profesi, dan keterlibatan aktif praktisi dalam proses pembelajaran.

Manfaat Kajian:

1. Manfaat Praktis/Kebijakan (Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi)
   - Landasan Pengambilan Keputusan: Memberikan pijakan analitis yang kuat bagi Rektor dan pengelola lembaga dalam memformulasikan Peraturan Rektor terkait tata kelola kurikulum dan kemitraan strategis.
   - Kepastian Hukum Kemitraan: Membantu institusi merancang bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang mengikat dan operasional dengan mitra industri, tidak sekadar Nota Kesepahaman (MoU) komitmen formalitas.
2. Manfaat Akademis (Bagi Program Studi dan Dosen)
   - Penyelarasan Kurikulum Lincah (*Agile*): Memfasilitasi program studi dalam merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis capaian (*Outcome-Based Education*) yang responsif terhadap laju perkembangan teknologi.
   - Penguatan Kapasitas Pengajaran: Mendorong pengembangan kapasitas praktis dosen melalui skema kemitraan, program *industry immersion*, dan kolaborasi riset terapan bersama praktisi industri.
3. Manfaat Operasional (Bagi Mahasiswa dan Alumni)
   - Peningkatan Daya Saing Kerja: Membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis, portofolio proyek nyata, serta sertifikasi kompetensi industri yang memperkuat nilai tawar di pasar kerja.
   - Kepastian Pengakuan Akademik: Memberikan jaminan konversi SKS secara penuh untuk kegiatan magang terstruktur (*Co-Op Education*) dan aktivitas pembelajaran berbasis praktik industri.
4. Manfaat Ekosistem (Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri/DUDI)
   - Saluran Talenta Berkualitas (*Talent Pipeline*): Membuka akses langsung bagi industri untuk mendapatkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap kerja sesuai dengan standar kualifikasi perusahaan.
   - Ruang Partisipasi Aktif: Menyediakan wadah terstruktur bagi praktisi DUDI untuk berpartisipasi dalam pembentukan modal manusia (*human capital*) nasional tanpa hambatan birokrasi yang kaku.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. *Human Capital Theory* (Teori Modal Manusia).

   Teori ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu yang berdampak langsung pada produktivitas serta daya saing di pasar kerja. Ketika kurikulum pendidikan tinggi tidak selaras dengan perkembangan teknologi industri digital, efisiensi investasi modal manusia menjadi menurun (*sub-optimal*), sehingga memicu tingginya angka pengangguran terstruktur (Poniman dkk. 2026).

   Dalam ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), perguruan tinggi memegang peran sentral sebagai penyedia utama modal manusia berkualitas tinggi. Ketika investasi pendidikan tidak selaras dengan dinamika

kebutuhan sektor industri digital, maka modal manusia yang dihasilkan akan mengalami penurunan tingkat efisiensi (*sub-optimal human capital utilization*), yang pada akhirnya dapat memicu fenomena pengangguran terstruktur di tingkat sarjana (Chemli, Toanoglou, dan Roman 2024).

Kesenjangan kualifikasi atau *skills mismatch* antara luaran akademis dan kebutuhan industri modern berdampak negatif terhadap pengembalian investasi (*return on investment*) pendidikan, baik bagi individu maupun negara. Penyesuaian kurikulum perguruan tinggi yang adaptif terhadap akselerasi teknologi digital menjadi prasyarat mutlak agar investasi modal manusia mampu menghasilkan luaran produktif yang terserap secara optimal oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI. Oleh karena itu, penguatan modal manusia melalui restrukturisasi pembelajaran berbasis kebutuhan pasar kerja sangat mendesak untuk mencegah degradasi nilai ekonomis dari ijazah sarjana (Bimala Putri, Delia Tamim, dan Hesti Putri 2026).

2. *Triple Helix Model* (Model Kemitraan Akademisi, Industri, dan Pemerintah).

   Konsep ini menegaskan bahwa inovasi dan relevansi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) hanya dapat dicapai melalui interaksi harmonis antara tiga elemen: akademisi (university), industri (industry), dan pemerintah (government) (Nandini Tandon 2024). Regulasi pemerintah yang menyediakan insentif bagi DUDI menjadi pendorong utama (catalyst) agar industri mau berpartisipasi aktif dalam perancangan kurikulum kampus (Hidayati 2026a).

   Keberhasilan implementasi *Triple Helix Model* sangat bergantung pada kekuatan regulasi pemerintah yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan budaya kerja antara dunia akademis dan sektor bisnis. Tanpa adanya intervensi kebijakan publik yang menyediakan insentif konkret—seperti fasilitas pengurangan pajak (*tax deduction*) atau pengakuan legal atas partisipasi industri—pihak DUDI cenderung enggan untuk terlibat secara intensif dalam perancangan kurikulum kampus. Akibatnya, hubungan kemitraan sering kali terhenti pada tataran formalitas komitmen (*paper-based agreement*) tanpa memberikan dampak substantif bagi peningkatan relevansi lulusan (Hidayati 2026a). Dalam konteks UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sinergi Triple Helix dimotori oleh CDC yang menjalin kemitraan dengan DUDI untuk fasilitasi rekrutmen, magang, pelatihan, dan konseling karir.

3. *Outcome-Based Education* (OBE) Theory (Teori Pendidikan Berbasis Capaian).

   Pendekatan OBE menekankan bahwa perancangan kurikulum harus dimulai dari pemetaan kualifikasi dan kompetensi akhir (learning outcomes) yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja, bukan dari ketersediaan materi teoretis pengajar. Keterlibatan praktisi DUDI dalam menyusun capaian pembelajaran menjadi syarat mutlak agar kelulusan mahasiswa terukur secara empiris sesuai standar profesi (Baidowi, Syamsudin, dan Khan 2026).

   Berbeda dengan model pembelajaran konvensional yang berfokus pada penyampaian materi teoretis berbasis dosen (*content-based approach*), OBE menuntut formulasi profil lulusan dan capaian pembelajaran yang diukur berdasarkan kriteria objektif yang dituntut oleh dunia kerja profesional (Manalu dkk. 2026).

   Dalam praktiknya, keberhasilan paradigma OBE mensyaratkan keterlibatan aktif dari praktisi dan pemangku kepentingan DUDI sejak tahapan awal perancangan kurikulum (co-design curriculum). Partisipasi industri sangat dibutuhkan untuk memetakan standar kompetensi kerja, memvalidasi kualifikasi profesi, dan

menyusun indikator penilaian capaian pembelajaran yang relevan dengan standar industri digital (Nesa Novrizal & Rio Ravi Muhammad, 2025). Tanpa adanya penyelarasan antara indikator capaian pembelajaran internal kampus dan kebutuhan empiris industri, penerapan OBE di perguruan tinggi berisiko hanya menjadi rutinitas administrasi akademis yang gagal menyelesaikan persoalan *skills mismatch* (Hegde dan Kavade 2025).

4. *Curriculum Alignment Theory* (Teori Keselarasan Kurikulum).

   Teori keselarasan kurikulum (*Curriculum Alignment Theory*) menegaskan bahwa tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan proses evaluasi harus selaras secara eksplisit dengan lingkungan praktik profesional. Diskoneksi antara materi akademis internal dan realitas kerja digital menciptakan skills mismatch akibat tiadanya keselarasan antara lingkungan belajar (learning environment) dengan ekosistem penerapannya (Barreto dan Conklin 2025).

   Diskoneksi antara materi pembelajaran teoretis di dalam kelas dan dinamika kebutuhan teknologi di industri menciptakan jurang pemisah (*gap*) yang menyebabkan terjadinya *skills mismatch*. Ketika aktivitas pembelajaran dan instrumen evaluasi tidak mencerminkan kasus studi bisnis aktual maupun penggunaan alat/perangkat lunak (*software/tools*) standar industri modern, mahasiswa akan kehilangan konteks penerapan praktis atas ilmu yang dipelajarinya. Oleh karena itu, keselarasan konstruktif memerlukan pembaruan kurikulum secara berkala melalui pengintegrasian pengalaman kerja nyata (*work-integrated learning*) ke dalam struktur pembelajaran akademis (Mahalingam, Ghonim, dan Bunagan 2024).

5. *Incentive-Based Policy Theory* (Teori Kebijakan Berbasis Insentif).

   Teori ini menjelaskan bahwa intervensi kebijakan publik akan efektif apabila menyediakan skema insentif ekonomi maupun regulatif bagi aktor non-pemerintah (seperti DUDI) untuk mengubah perilakunya. Tanpa adanya kebijakan insentif resmi (seperti pengurangan pajak atau pengakuan sertifikasi), DUDI cenderung menganggap partisipasi dalam pengembangan kurikulum kampus sebagai beban biaya (*cost center*), bukan investasi strategis (Muhammad Zahdi Husaini & Asmiati, 2026).

   Dalam konteks interaksi antara perguruan tinggi dan sektor swasta, entitas DUDI senantiasa beroperasi dengan kalkulasi rasional terkait alokasi sumber daya, efisiensi, dan imbal hasil bisnis (*return on investment*) (Pepilina 2025).

   Tanpa adanya kebijakan insentif yang menguntungkan dan mengikat dari pemerintah, sektor industri cenderung memandang keterlibatan mereka dalam perancangan kurikulum, pembimbingan magang, maupun penyediaan praktisi mengajar sebagai beban biaya (*cost center*) yang menguras waktu dan sumber daya. Oleh sebab itu, penerbitan regulasi kebijakan yang dilengkapi dengan skema insentif yang jelas—seperti pengakuan sertifikasi, kemudahan kemitraan riset terapan, hingga skema *super tax deduction*—sangat diperlukan untuk mendorong industri bertransisi dari partisipasi pasif menjadi mitra strategis aktif dalam pengembangan pembelajaran di perguruan tinggi (Rianto et al., 2022).

Kerangka Konseptual

1. *Work-Integrated Learning* (WIL)/Pembelajaran Terintegrasi Kerja.

   Konsep WIL menekankan penggabungan akademis teoretis dengan pengalaman praktis di tempat kerja nyata secara terstruktur. Penerapan WIL melalui

keterlibatan praktisi DUDI dalam perancangan materi hingga pengajaran langsung memastikan mahasiswa memperoleh keterpaparan (exposure) pada standar industri digital sebelum melangkah ke pasar kerja. (Shibani dan Buck 2022).

Integrasi WIL dalam kurikulum pendidikan tinggi terbukti secara signifikan memangkas kurva adaptasi lulusan saat mentransisikan diri dari dunia akademik ke lingkungan kerja profesional. Dalam kerangka industri digital yang dinamis, kolaborasi penyusunan instruksional WIL antara praktisi industri dan pengajar kampus memastikan bahwa *soft skills* seperti komunikasi interdisipliner dan fleksibilitas pemecahan masalah dapat terbentuk sejalan dengan penguasaan *hard skills* (Dalrymple 2026). Di UIN SSC, skema WIL diperkuat melalui 8 core program CDC, khususnya program Magang dan Kemitraan yang terukur.

2. *Digital Skills Capability Framework* (Kerangka Kapabilitas Keterampilan Digital).

   Kerangka kerja ini memetakan tingkatan kompetensi digital—mulai dari literasi dasar, kompetensi terapan, hingga keahlian profesional spesifik. Penggunaan kerangka ini dalam kurikulum membantu kampus mengidentifikasi jenis keterampilan teknis (hard skills) dan soft skills digital yang sedang dibutuhkan DUDI, sehingga mencegah risiko kerancuan materi pembelajaran (Demartini dkk. 2026).

   Pengadopsian kerangka kerja kapabilitas digital yang komprehensif sangat krusial guna menghindari simplifikasi pembelajaran teknologi yang kerap hanya berhenti pada literasi instrumen dasar. Dengan merujuk pada taksonomi kapabilitas digital yang diakui secara global, perguruan tinggi dapat menyusun pemetaan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*) yang memiliki granularitas tinggi, terspesifikasi, dan relevan dengan matriks kualifikasi kebutuhan tenaga kerja DUDI modern (Setiadi dkk. 2025)

3. *Regulatory Sandbox in Higher Education* (Uji Coba Regulasi Terbatas Pendidikan Tinggi).

   Konsep regulatory sandbox menyediakan ruang diskresi atau fleksibilitas aturan khusus bagi perguruan tinggi untuk merancang kurikulum adaptif dan bekerja sama secara inklusif dengan DUDI tanpa terhambat oleh kekakuan regulasi standar administratif internal. Hal ini memungkinkan kampus mempercepat siklus pengesahan mata kuliah berbasis teknologi baru (Ardhana Januar Mahardhani dkk. 2023).

   Penerapan mekanisme *sandbox* tata kelola akademik bertindak sebagai laboratorium kebijakan (*policy lab*) yang mengisolasi risiko kegagalan sistemik akibat eksperimentasi kurikulum baru. Diskresi regulatif yang terkontrol ini memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk merespons gelombang disrupsi teknologi digital secara lincah (*agile governance*) tanpa melanggar prinsip kehati-hatian akreditasi (Hibbert 2026).

4. *Co-Design Curriculum Approach* (Pendekatan Perancangan Kurikulum Kolaboratif).

   Pendekatan co-design menempatkan praktisi industri bukan sekadar sebagai peninjau pasif (reviewer), melainkan sebagai mitra setara (co-creator) dalam merumuskan capaian pembelajaran, penyusunan kasus studi, dan instrumen penilaian. Pendekatan ini menjamin kurikulum yang dihasilkan memiliki relevansi tinggi dan keterikatan tanggung jawab dari pihak DUDI (Shrivastava dkk. 2020).

   Kerangka perancangan *co-design* mengubah paradigma penyusunan kurikulum dari pendekatan paternalistik-akademis menjadi ekosistem partisipatif yang

transdisipliner. Studi empiris oleh Dollinger et al. (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan eksternal (termasuk *industry partners* dan mahasiswa) dalam *co-creation* kurikulum secara berkesinambungan mampu memperkecil jurang *expectation gap* antara materi pengajaran dan kebutuhan lapangan. Melalui metode ini, rancangan perkuliahan tidak hanya berbasis teori abstrak, melainkan diinfusi langsung oleh masalah bisnis nyata (*real-world case studies*) serta teknologi terapan terkini yang dibawa langsung oleh praktisi (Taffe, Pedell, dan Wilkinson 2018).

5. *Public-Private Partnership* (PPP) dalam Pendidikan Tinggi.

   Konsep Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) dalam konteks pendidikan menciptakan mekanisme pembagian risiko, sumber daya, dan manfaat (*risk* and *benefit sharing*) antara kampus dan institusi bisnis. Melalui skema ini, DUDI mendapatkan akses terhadap calon talenta terbaik (*talent pipeline*), sementara kampus memperoleh pembaruan teknologi dan fasilitas tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran internal (S. Yu. Witte Moscow University, Moscow, Russia dan Pridantsev 2023).

   Implementasi PPP di lingkungan pendidikan tinggi berperan sebagai solusi institusional atas keterbatasan anggaran negara dan fiskal internal perguruan tinggi dalam membiayai infrastruktur siber berbiaya tinggi. Skema kemitraan strategis ini tidak sekadar menyediakan fasilitas fisik atau peranti lunak (*hardware/software*), melainkan membangun konsorsium transfer pengetahuan berkelanjutan. Keterlibatan sektor swasta melalui investasi fasilitas riset dan laboratorium siber bersama memberikan jaminan keberlanjutan (*sustainability*) peremajaan teknologi perkuliahan serta memperkuat penyediaan *talent pipeline* terdidik yang siap diserap langsung oleh industri mitra (Warsaw University of Technology dan Chojecka 2025)

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis jenis analisis kebijakan (*policy analysis research*) yang bersifat deskriptif-evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam kompleksitas fenomena *skills mismatch* serta menganalisis dinamika regulasi tata kelola kurikulum di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Penelitian kebijakan tidak berfokus pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman komprehensif terhadap masalah publik, evaluasi alternatif kebijakan, dan penyusunan rekomendasi tindakan yang presisi (Hidayati 2026).

Kajian ini sepenuhnya dioperasionalkan menggunakan data sekunder (*documentary research*) tanpa mengikutsertakan metode wawancara langsung. Penggunaan studi dokumen dinilai objektif dan sahih dalam penelitian kebijakan karena berfokus pada analisis teks normatif, dokumen regulasi, dan bukti empiris literatur. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua:

- Data Sekunder Utama (Regulasi dan Kebijakan): Meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, KMA Nomor 83 Tahun 2022 tentang Cyber University, serta PMA Nomor 11 Tahun 2024.
- Data Sekunder Pendukung (Literatur Akademis): Berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai *skills mismatch*, *Triple Helix Model*, *Outcome-*

Based *Education* (OBE), dan *co-design curriculum* yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.

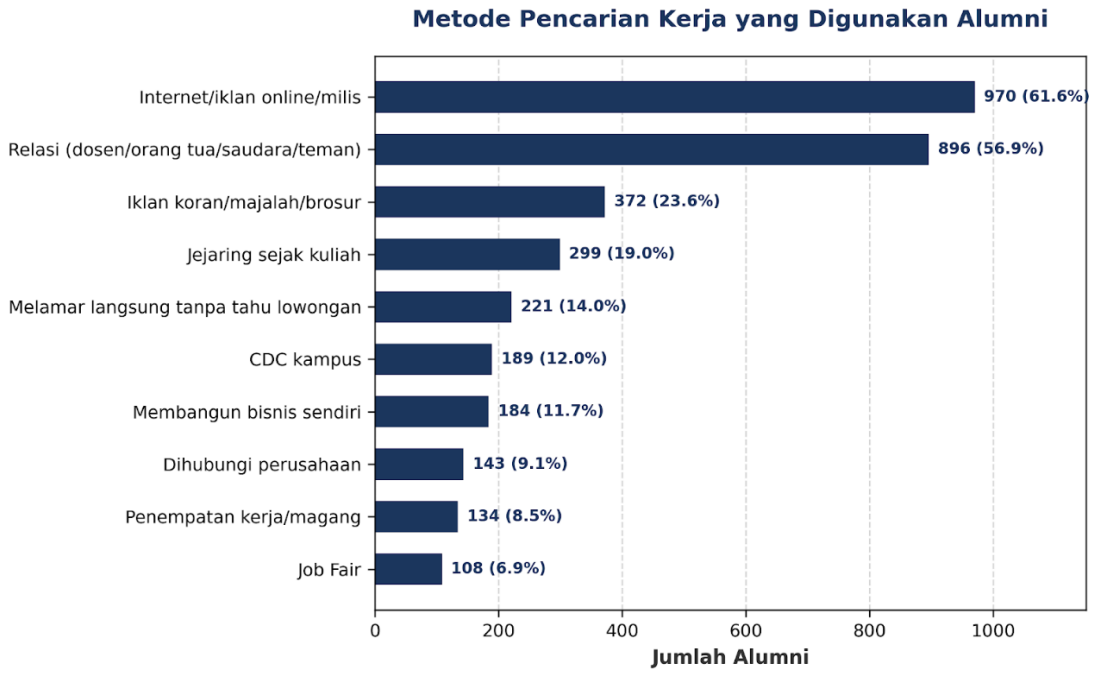
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan (*library research*) yang terstruktur. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan penyaringan (*screening*) dokumen, perangkuman isi (*content extraction*), dan pengelompokan temuan berdasarkan indikator-indikator prioritas masalah dan instrumen kebijakan.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data kualitatif (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak internal kampus (pengelola/dosen) dengan pihak eksternal (praktisi DUDI), sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menyilangkan hasil analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam, dan temuan FGD.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan *skills mismatch* atau ketidakselarasan antara kualifikasi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan aktual pasar kerja di era ekonomi digital merupakan tantangan struktural yang kompleks. Pada lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), khususnya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, fenomena ini tidak hanya berdampak pada peningkatan angka pengangguran terstruktur sarjana, melainkan juga mengancam efektivitas transformasi institusi menjadi perguruan tinggi berbasis siber (*cyber university*). Berdasarkan temuan data primer melalui FGD, wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen Tracer Study yang dikelola oleh *Career Development Center* (CDC), teridentifikasi bahwa akar masalah utama dari kesenjangan kompetensi ini berpusat pada minimnya keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam proses perancangan dan evaluasi kurikulum.

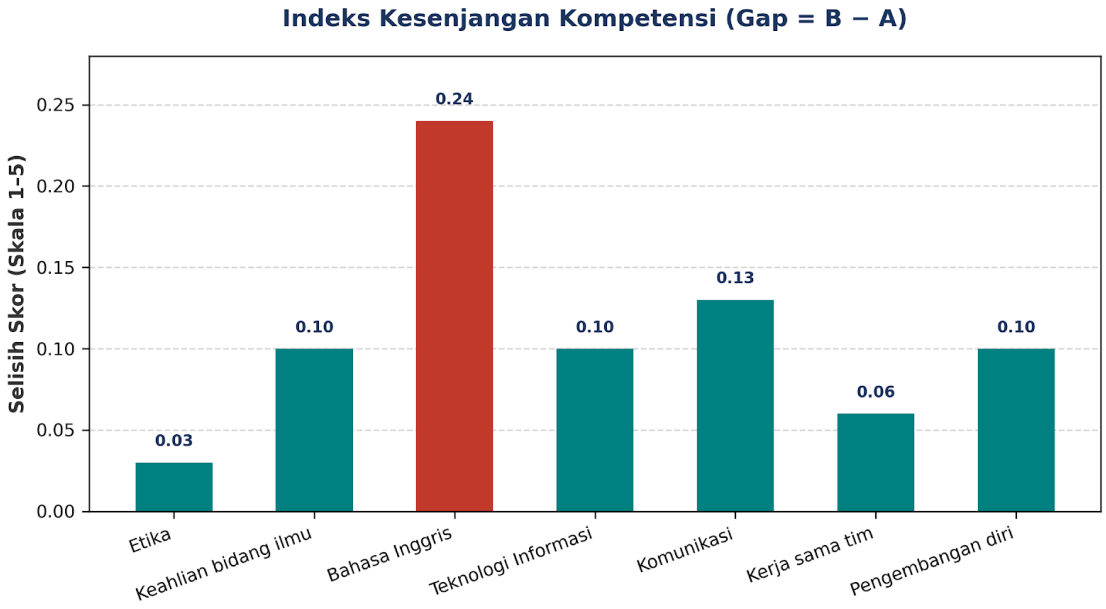


Sumber: data diolah dari PD Dikti, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan data bahwa dari 1.574 alumni, sebesar 51,65% (813 alumni) belum bekerja/sedang mencari kerja dan 40,41% (636 alumni) bekerja, memperkuat fakta pentingnya peninjauan kurikulum bersama DUDI.

Ketiadaan keterlibatan praktisi industri dalam perancangan kurikulum akademis diperparah oleh adanya benturan budaya kerja serta ekspektasi waktu (*time horizon*) yang tajam antara dunia akademis dan sektor swasta. Perguruan tinggi beroperasi di dalam koridor administrasi yang cenderung kaku, terikat oleh ritme birokrasi, dan dibatasi oleh kalender akademik tahunan yang berjangka panjang. Sebaliknya, entitas DUDI bergerak dalam dinamika pasar berbasis persaingan cepat, menuntut fleksibilitas, adaptabilitas tinggi, serta pengambil keputusan yang berorientasi pada hasil (*output-driven*) secara instan. Perbedaan ritme operasional ini memicu kemacetan komunikasi teknis. Pihak industri kerap menganggap prosedur birokrasi peninjauan kurikulum di kampus terlalu lambat dan tidak efisien, sementara pengelola program studi sering kali kesulitan menyesuaikan jadwal dosen internal dengan kesibukan profesional para praktisi DUDI.

Di sisi internal perguruan tinggi, keterbatasan kapasitas praktis dan pengalaman industri langsung dari para dosen pengampu menjadi rantai masalah berikutnya. Sebagian besar dosen pengampu mata kuliah keahlian di lingkungan PTKI berlatar belakang akademis murni yang belum pernah mengalami interaksi kerja nyata di ekosistem industri digital modern maupun mengikuti program *industry immersion* (magang industri dosen). Kondisi ini membatasi kedalaman dan relevansi pengajaran praktis yang disajikan di ruang kelas. Penyampaian materi perkuliahan akhirnya tertahan pada tataran pemahaman teoritis konvensional dan pengenalan konsep-konsep abstrak tanpa diimbangi pemajanan (*exposure*) pada kasus bisnis aktual (*real-world case studies*) maupun instrumen teknologi terapan terkini.



Sumber: data diolah dari PD Dikti, 2025.

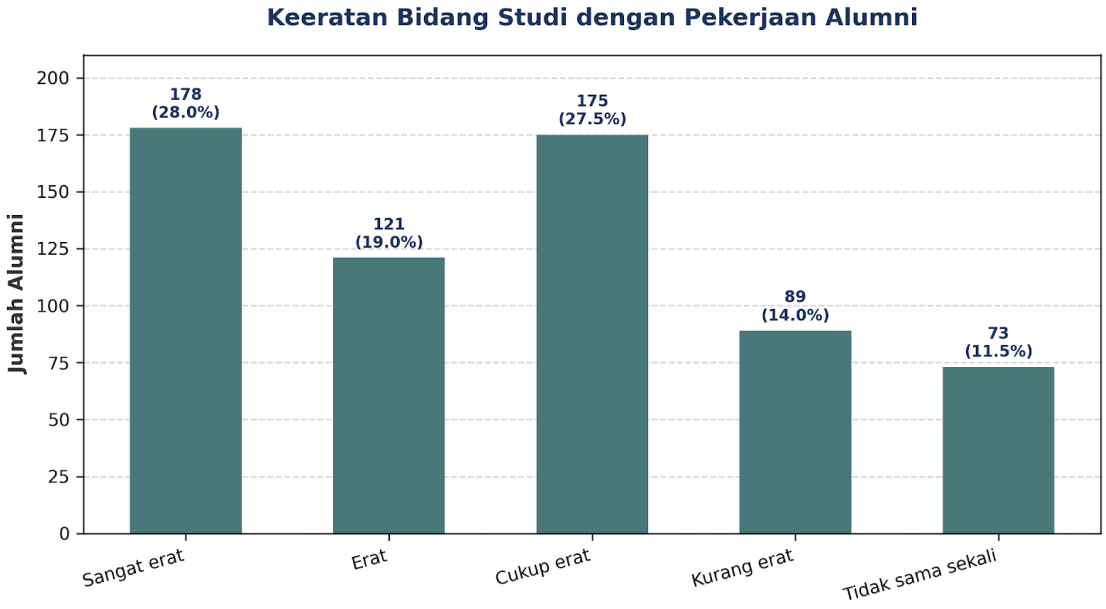
Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan secara detail bahwa seluruh variabel kompetensi dalam pekerjaan (B) memiliki skor kebutuhan lebih tinggi dibanding penguasaan alumni saat lulus (A), dengan kesenjangan terbesar pada *Bahasa Inggris* (+0,24), *Komunikasi* (+0,13), *Keahlian Bidang Ilmu* (+0,10), dan *Teknologi Informasi* (+0,10).

Upaya mandiri untuk meningkatkan kapasitas praktis dosen internal pun terbentur oleh skema evaluasi kinerja yang belum adaptif. Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dan syarat kenaikan jabatan fungsional (akademik) masih dominan berorientasi pada luaran akademis konvensional, seperti publikasi artikel ilmiah teoretis. Aktivitas strategis dosen seperti pembimbingan magang industri terstruktur, keterlibatan dalam konsorsium riset terapan bersama DUDI, hingga kepemilikan sertifikasi kompetensi profesi terstandar sering kali belum memperoleh bobot ekuivalensi SKS atau angka kredit yang sepadan. Ketimpangan skema insentif ini secara langsung mereduksi motivasi dosen untuk mengalokasikan waktu dan energi dalam memperbarui portofolio praktisnya di industri.

Sebagai alternatif untuk menghadirkan keahlian praktis di ruang kelas, skema Dosen Praktisi melalui program *Practitioner-to-Faculty* sebenarnya telah digagas. Namun, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan PTKI pada umumnya menghadapi hambatan finansial serta legal-administrasif yang signifikan untuk merekrut praktisi DUDI tingkat menengah hingga atas (*top-tier professionals*) secara berkesinambungan. Keterbatasan alokasi anggaran operasional internal universitas untuk memberikan honorarium yang kompetitif sesuai standar industri, diiringi oleh kerangka aturan rekrutmen pengajar tidak tetap yang kaku, menjadi tembok penghalang utama bagi masuknya para pakar industri digital ke dalam ekosistem pembelajaran kampus.

Permasalahan ini kian memburuk akibat lambatnya siklus evaluasi dan pembaruan kurikulum di tingkat universitas. Prosedur pengesahan perubahan kurikulum harus melintasi rantai birokrasi berjenjang yang amat panjang—mulai dari Rapat Kerja Dosen Rumpun di tingkat Jurusan/Program Studi, persetujuan Senat Fakultas, hingga verifikasi dan penetapan di tingkat universitas serta Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Siklus ini memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga peninjauan kurikulum umumnya baru dilakukan dalam rentang 4 hingga 5 tahun sekali. Rantai birokrasi yang rigid ini sangat tidak kompatibel dengan laju perkembangan teknologi digital yang berubah dalam hitungan bulan.

Dampak dari *time-lag* birokrasi ini adalah kadaluarsanya muatan materi perkuliahan sebelum mahasiswa menyelesaikan studinya. Sebagai contoh, ketika sektor industri digital telah secara masif mengadopsi teknologi kecerdasan buatan generatif (*generative AI*), analisis data tingkat lanjut (*big data analytics*), komputasi awan (*cloud computing*), dan keamanan siber (*cybersecurity*), struktur kurikulum di kampus masih berputar pada pengenalan algoritma pemrograman dasar dan teori manajemen konvensional. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan tidak memiliki kualifikasi teknis (*hard skills*) yang relevan, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki daya tawar (*bargaining position*) saat memasuki tahap seleksi kerja di perusahaan bernilai tambah tinggi.

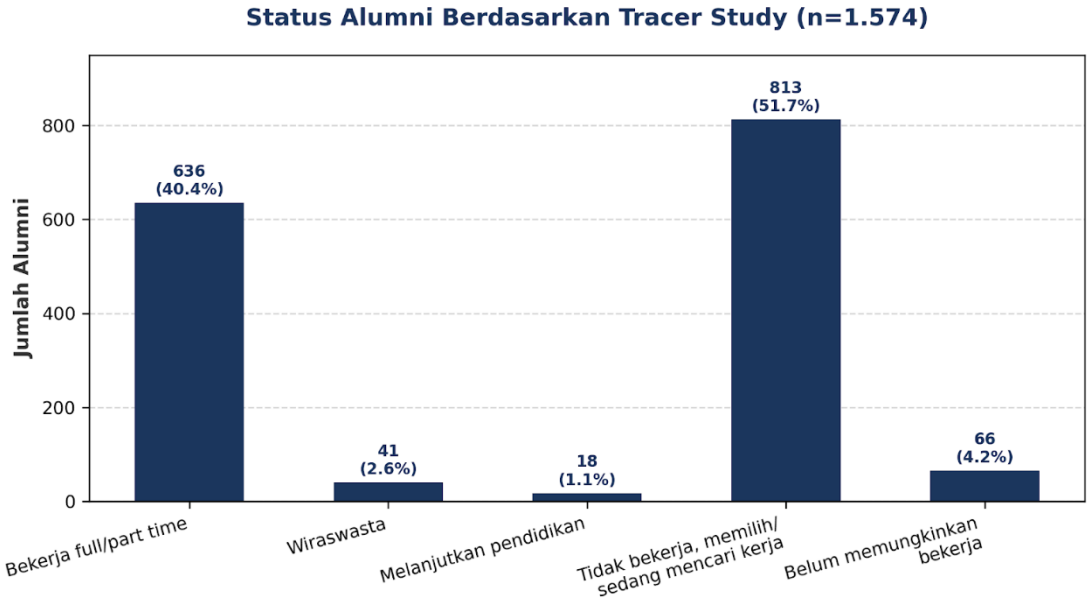


Sumber: data diolah dari PD Dikti, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, menggambarkan bahwa 53% alumni menilai bidang studinya belum sepenuhnya erat dengan pekerjaan aktual (hanya cukup erat, kurang erat, atau tidak sama sekali), yang menjadi dasar dibutuhkannya mekanisme *Regulatory Sandbox* dan *Co-Design Curriculum*.

Lemahnya penjaminan mutu kurikulum ini juga dipengaruhi oleh durasi dan mekanisme pemanfaatan *tracer study* yang belum terintegrasi secara *real-time*. Pengumpulan data alumni dan umpan balik pengguna lulusan (*user feedback*) kerap dilakukan secara berkala hanya untuk memenuhi dokumen administratif akreditasi nasional. Padahal, data Tracer Study yang dikelola oleh CDC UIN SSC menyimpan variabel krusial mengenai masa tunggu kerja, tingkat keterserapan alumni, kesesuaian bidang kerja, hingga besaran pendapatan awal. Tanpa adanya integrasi sistem pemantauan data digital yang dapat diakses secara *real-time* oleh pengelola program studi, evaluasi kurikulum kehilangan pijakan data empiris yang sahih untuk menentukan mata kuliah mana yang memerlukan tindakan korektif secara cepat.

Isolasi sistem pembelajaran dari dunia kerja nyata ini menghambat efektivitas penerapan *Work-Integrated Learning* (WIL). Berdasarkan *Curriculum Alignment Theory* dan konsep WIL, pengalaman belajar akademis teoretis di dalam kelas wajib dipadukan secara terstruktur dengan pengalaman praktis di tempat kerja agar pembentukan kompetensi mahasiswa berjalan utuh. Namun, karena program magang selama ini belum ditopang oleh kurikulum berbasis *co-design* bersama DUDI, pelaksanaan magang mahasiswa sering kali terdegradasi menjadi sekadar pemenuhan presensi administratif tanpa adanya beban tugas teknis yang terukur. CDC UIN SSC sebagai unit pengelola magang dan kemitraan kerap menghadapi kendala ketika mencoba menyelaraskan aktivitas magang mahasiswa dengan kebutuhan operasional DUDI akibat belum adanya payung hukum Peraturan Rektor yang mewajibkan konversi SKS secara penuh.



Sumber: data diolah dari PD Dikti, 2025.

Grafik di atas menyoroti dominasi saluran mandiri/internet (61,6%) dan relasi personal (56,9%), sementara saluran institusional seperti CDC (12,0%) dan penempatan magang terstruktur (8,5%) masih sangat rendah, menguatkan perlunya Peraturan Rektor untuk fasilitasi kemitraan DUDI dan konversi SKS.

Selain itu, minimnya integrasi skema sertifikasi kompetensi terstandar ke dalam struktur kurikulum wajib semakin memperlemah daya saing alumni UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di pasar kerja digital global, ijazah akademis murni tidak lagi menjadi jaminan tunggal bagi rekruter industri. Industri menuntut adanya sertifikasi profesi yang diakui secara nasional (seperti sertifikasi BNSP) maupun secara internasional (seperti sertifikasi dari Google, AWS, Microsoft, atau Cisco) sebagai bukti keahlian teruji. Kurikulum yang tidak menyediakan ruang penyetaraan sertifikasi kompetensi ini memaksa mahasiswa mengambil pelatihan mandiri di luar kampus dengan beban biaya yang mahal, atau merugikan mahasiswa yang terpaksa lulus tanpa bekal sertifikat profesi.

Kondisi ketimpangan ini sangat bertentangan dengan semangat pemutakhiran Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Regulasi tersebut pada dasarnya memberikan ruang fleksibilitas dan diskresi yang amat luas bagi perguruan tinggi untuk merancang kurikulum berbasis capaian (*Outcome-Based Education*/OBE), menyederhanakan bentuk tugas akhir, serta mengakui skema pembelajaran berbasis pengalaman di luar kampus secara progresif. Namun, fleksibilitas regulasi nasional ini belum dapat ditangkap dan diterjemahkan secara operasional oleh pimpinan PTKI akibat ketiadaan Peraturan Rektor yang memayunginya.

Untuk keluar dari jebakan birokrasi ini, adopsi konsep *Regulatory Sandbox* dalam tata kelola akademik universitas menjadi solusi yang mendesak. Melalui mekanisme *regulatory sandbox*, Rektor dapat memberikan diskresi atau ruang uji coba terbatas bagi program studi untuk meluncurkan, mengevaluasi, dan memperbarui kurikulum berbasis teknologi baru setiap 1–2 tahun sekali bersama DUDI tanpa perlu melalui rantai persetujuan universitas yang panjang dan kaku. *Regulatory sandbox* bertindak sebagai *policy lab* yang memberi kepastian hukum bagi pengelola prodi untuk bereksperimen

merancang mata kuliah masa depan secara lincah (*agile governance*) tanpa khawatir melanggar standar akreditasi.

Penerapan pendekatan *Co-Design Curriculum* (perancangan kurikulum kolaboratif) merupakan perwujudan konkret dari paradigma OBE dan *Triple Helix Model*. Melalui *co-design*, praktisi DUDI ditransformasikan dari sekadar peninjau pasif (*passive reviewer*) menjadi mitra sejajar (*co-creator*) bersama dosen internal. Praktisi DUDI dilibatkan secara aktif sejak tahap awal: memetakan profil lulusan, menyusun analisis capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), menyusun instrumen penilaian, merancang modul perkuliahan, hingga membawa studi kasus nyata dari industri ke dalam kelas. Kolaborasi ini menjamin bahwa seluruh materi yang dipelajari mahasiswa memiliki tingkat keterpakaian (*applicability*) yang tinggi di lapangan kerja.

Dalam kerangka efisiensi sumber daya, strategi kemitraan ini juga sejalan dengan konsep *Public-Private Partnership* (PPP) dalam lingkungan pendidikan tinggi. Pengadaan laboratorium siber, perangkat keras berkinerja tinggi, dan lisensi perangkat lunak industri membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar jika ditanggung secara mandiri oleh PTKI. Melalui skema PPP yang dituang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis, keterbatasan anggaran kampus dapat diatasi melalui pemanfaatan bersama fasilitas riset, infrastruktur komputasi, dan *software* milik mitra DUDI. Sebagai imbal baliknya, DUDI memperoleh akses prioritas terhadap *talent pipeline*—yaitu lulusan-lulusan terbaik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah dilatih menggunakan standar operasional perusahaan mereka.

Kegagalan dalam melakukan intervensi kebijakan yang sistemik untuk menyelesaikan akar masalah ini akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Ketimpangan kualitas lulusan akan terus memperlebar jurang pengangguran sarjana, memperpanjang masa tunggu kerja alumni, serta merendahkan posisi tawar lulusan PTKI di pasar kerja nasional. Secara kelembagaan, kondisi ini akan menurunkan reputasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang tengah membangun citra sebagai *pioneer* perguruan tinggi keagamaan berbasis siber.

Oleh karena itu, penerbitan regulasi di tingkat Rektor berupa Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemitraan Strategis dan Co-Design Curriculum Bersama DUDI menjadi kebutuhan hukum yang paling mutlak dan mendesak. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum internal yang memberikan mandat wajib bagi program studi untuk mengintegrasikan DUDI dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Regulasi tersebut juga memformalkan peran CDC UIN SSC sebagai fasilitator kemitraan, memberikan jaminan kepastian hukum atas konversi SKS magang terstruktur (*Co-Op Education*), memfasilitasi rekognisi sertifikasi profesi, serta mengatur skema insentif BKD bagi dosen internal yang terlibat aktif dalam kolaborasi industri.

Reformasi kebijakan internal ini pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (5) untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Dengan menghadirkan regulasi yang memadukan keselarasan kurikulum, fleksibilitas birokrasi, dan kemitraan strategis DUDI, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon akan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara keilmuan keagamaan, melainkan juga memiliki daya saing global di era ekonomi digital.

Volume 5 Issue 2, September – December 2026; e-ISSN: 2962-1860; p-ISSN: 3047-0153; SINTA 2 (S2) 13890; DOAJ

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   Pasal 31 Ayat (3): Mencantumkan kewajiban pemerintah mengusahaan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

   Pasal 31 Ayat (5): Amanat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Undang-Undang (UU)

   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

   Pasal 35 Ayat (1) & (2): Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

   Pasal 36 Ayat (2): Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

   Pasal 38 Ayat (3): Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi.

   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

   Pasal 35 Ayat (1): Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

   Pasal 84 Ayat (1) & (2): Untuk meningkatkan relevansi Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri (DUDI).

3. Peraturan Pemerintah (PP)

   Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

   Pasal 27: Mengatur tentang kewenangan perguruan tinggi dalam menyusun dan merespesifikasi kurikulum program studi agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja.

   Pasal 89: Kemitraan strategis antara Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan penyerapan lulusan.

   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan

   Pasal 10: Menjelaskan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.

4. Peraturan Presiden (Perpres)

   Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Pasal 2 & Pasal 5: Penetapan penjenjangan kualifikasi kemampuan yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja guna pemberian pengakuan hasil belajar (khususnya Jenjang 6 untuk Sarjana/S1).

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Pasal 4 & Pasal 8: Mandat partisipasi aktif dan sinergi antara lembaga pendidikan/pelatihan dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDI) dalam penyusunan standar kompetensi dan kurikulum terintegrasi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)

   Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

   Pasal 6, 7, & 18: Penyederhanaan dan fleksibilitas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), pembukaan ruang penerapan *Outcome-Based Education* (OBE), skema pembelajaran di luar program studi/magang industri, serta kemudahan penyesuaian kurikulum secara rinci dan adaptif.

6. Peraturan Menteri Agama (PMA) & Keputusan Menteri Agama (KMA)

   Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

   Pasal mengenai Fungsi PTKN: Penguatan tata kelola akademik, penyelenggaraan pendidikan berbasis digital/siber, dan pengembangan kemitraan strategis lembaga.

   Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

   Pasal 3 & Pasal 7: Ketentuan penyusunan kurikulum PTKI yang fleksibel, berbasis KKNI dan SN-Dikti, serta mengamanatkan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala sesuai perkembangan tuntutan dunia kerja.

   Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Siber (*Cyber University*)

   Bagian Standar Pembelajaran & Kurikulum: Penyelenggaraan sistem pembelajaran digital yang responsif, adaptif terhadap literasi teknologi modern, dan relevan dengan industri digital global.

Limitasi Kajian

1. Fokus Institusional: Kajian ini dibatasi pada ekosistem dan tata kelola akademik di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berbasis siber, sehingga dinamika, karakteristik birokrasi, serta struktur kurikulum yang dianalisis mungkin memerlukan penyesuaian (*contextual adaptation*) jika diterapkan pada perguruan tinggi non-siber atau universitas umum.
2. Cakupan Sektor Industri: Pembahasan mengenai kualifikasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) difokuskan pada sektor ekonomi digital, teknologi informasi, dan industri berbasis layanan terapan, serta belum mencakup

karakteristik dan standar kompetensi pada industri berat atau manufaktur konvensional secara menyeluruh.

3. Aspek Kebijakan Internal: Analisis alternatif kebijakan dan rekomendasi difokuskan pada ranah diskresi regulasi tingkat universitas (Peraturan Rektor/Keputusan Rektor), sehingga tidak mengkaji secara mendalam perubahan kebijakan makro di tingkat kementerian (seperti formulasi regulasi nasional atau insentif pajak *super tax deduction* nasional).
4. Keterbatasan Operasional Administrasi: Kajian ini membatasi diri pada perumusan kerangka kebijakan, pedoman operasional penyelarasan kurikulum, dan bentuk kemitraan strategis, tanpa mengukur implikasi beban biaya finansial secara rinci (*detailed financial cost-benefit analysis*) untuk setiap program studi dalam jangka panjang.

Kebaruan/Kontribusi

1. Kebaruan Kajian (*Novelty*)
    - Model *Co-Design Curriculum* Spesifik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Siber: Kajian ini menghadirkan kerangka konseptual pertama yang memadukan pendekatan perancangan kurikulum kolaboratif (*co-design*) antara praktisi industri dan akademisi di lingkungan PTKI berbasis digital/siber, yang menyelaraskan nilai-nilai keilmuan keagamaan dengan tuntutan hard skills teknologi digital terapan.
    - *Mekanisme Regulatory Sandbox* Akademik Tingkat Universitas: Memperkenalkan gagasan penerapan ruang diskresi regulasi (*regulatory sandbox*) di tingkat Peraturan Rektor sebagai solusi legal-operasional untuk memangkas birokrasi peninjauan kurikulum yang kaku, sehingga program studi dapat melakukan pemutakhiran materi perkuliahan secara lincah (*agile governance*) sesuai laju disrupsi teknologi.
    - Transformasi Kemitraan dari *Paper-Based* ke *Action-Oriented*: Menawarkan formula konkrit peralihan model kerja sama kampus-DUDI dari sekadar Nota Kesepahaman (MoU) seremonial menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang mengikat dan terukur, mencakup penyetaraan kurikulum, magang terstruktur (*Co-Op Education*), hingga rekognisi sertifikasi profesi industri secara otomatis.
2. Kontribusi Kajian (*Contribution*)
    - Kontribusi Kebijakan (Praktis): Menyediakan draf usulan dan landasan analitis komprehensif bagi pimpinan perguruan tinggi dalam menyusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemitraan Strategis DUDI, yang siap diimplementasikan secara operasional oleh lembaga penjaminan mutu dan pengelola program studi.
    - Kontribusi Akademis dan Konseptual: Memperkaya literatur manajemen pendidikan tinggi keagamaan mengenai penerapan *Triple Helix Model* (akademisi, industri, dan pemerintah) dan *Outcome-Based Education* (OBE) yang berbasis pada analisis empiris kualifikasi pasar kerja digital.
    - Kontribusi Sosial dan Manajerial: Memberikan kepastian legalitas dan pengakuan akademik bagi mahasiswa dalam meraih pengalaman kerja nyata dan sertifikasi standar industri, yang secara langsung berkontribusi

memangkas angka pengangguran terstruktur sarjana (*skills mismatch*) serta meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja profesional.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif Kebijakan 1: Peraturan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pedoman Kemitraan Strategis dan *Co-Design Curriculum* Bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

- Substansi Kebijakan: Menerbitkan Peraturan Rektor yang mewajibkan seluruh Program Studi (Prodi) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah keahlian digital/terapan secara kolaboratif (*co-design*) bersama minimal 1 (satu) praktisi dari DUDI. Regulasi ini mengatur mekanisme penuangan kerja sama ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang mengikat di tingkat Fakultas/Prodi dengan difasilitasi oleh Career Development Center (CDC), bukan sekadar Memorandum of Understanding (MoU) formalitas.
- Tujuan: Menjamin kepastian hukum dan memberikan mandat operasional bagi Prodi untuk menyelaraskan muatan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) secara langsung dengan kualifikasi dan kebutuhan nyata DUDI modern.
- Dampak: Menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja digital, menghilangkan *paper-based agreement*, serta membuka saluran (*career pipeline*) penyerapan alumni UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon secara berkelanjutan.

Alternatif Kebijakan 2: Peraturan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Standar Fleksibilitas Peninjauan Kurikulum dan Penerapan *Regulatory Sandbox* Akademik Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE)

- Substansi Kebijakan: Mengatur prosedur operasional pemangkasan alur birokrasi peninjauan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas. Regulasi ini memberikan diskresi (*regulatory sandbox*) bagi Prodi untuk melakukan uji coba dan evaluasi materi perkuliahan teknologi siber setiap 1–2 tahun sekali berdasarkan analisis tracer study digital yang dikelola CDC dan masukan DUDI, tanpa harus menunggu siklus formal perubahan kurikulum 4-5 tahunan.
- Tujuan: Menciptakan tata kelola kurikulum yang lincah (*agile governance*) agar pengembangan materi pembelajaran di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dapat merespons akselerasi teknologi digital (seperti AI, *data analytics*, dan *cloud computing*) secara cepat.
- Dampak: Menghilangkan *time-lag* pembaruan kurikulum, memastikan materi perkuliahan selalu

mutakhir, dan menjamin keterukuran capaian pembelajaran sesuai kriteria *Outcome-Based Education* (OBE).

Alternatif Kebijakan 3: Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran Terintegrasi Kerja (*Work-Integrated Learning*), Magang Terstruktur (*Co-Op Education*), dan Rekognisi Sertifikasi Profesi

- Substansi Kebijakan: Menetapkannya pedoman teknis konversi SKS secara penuh (hingga 20 SKS) bagi mahasiswa yang mengikuti magang industri terstruktur selama 6–12 bulan melalui koordinasi CDC UIN SSC. Keputusan ini juga mewajibkan skema integrasi penyetaraan sertifikasi kompetensi industri terstandar (seperti BNSP, Google, AWS, Microsoft) sebagai komponen pengurang SKS atau pengganti sebagian tugas akhir/skripsi.
- Tujuan: Memberikan kepastian rekognisi akademik serta legalitas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja industri dan sertifikasi profesi resmi sebelum lulus.
- Dampak: Meningkatkan daya saing dan *bargaining position* lulusan di pasar kerja profesional serta memperpendek masa tunggu kerja alumni UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Alternatif Kebijakan 4: Peraturan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pedoman Program *Practitioner-to-Faculty* dan Skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik bagi Dosen Praktisi

- Substansi Kebijakan: Menyediakan payung hukum internal dan alokasi anggaran khusus universitas untuk merekrut praktisi DUDI papan atas sebagai Dosen Praktisi/Dosen Luar Biasa melalui skema RPL Akademik. Regulasi ini mengatur kesetaraan pengalaman kerja profesional DUDI dengan angka kredit pengajaran serta menyederhanakan tata cara administratif rekrutmen pengajar non-NIDN.
- Tujuan: Mengatasi keterbatasan kapasitas praktis dosen internal dan menghadirkan studi kasus serta ekosistem bisnis digital aktual langsung ke dalam ruang kelas.
- Dampak: Memperkaya suasana akademik dengan pengajaran berbasis proyek nyata (*project-based learning*) serta mempermudah prosedur pengadaan dosen industri di lingkungan PTKI.

Alternatif Kebijakan 5: Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pedoman Program *Industry Immersion* (Magang Industri) dan Insentif Ekuivalensi BKD bagi Dosen Pengampu

- Substansi Kebijakan: Mengatur skema penugasan magang industri (*industry immersion*) bagi dosen pengampu mata kuliah keahlian selama 1–3 bulan di

DUDI mitra, disertai pembiayaan sertifikasi profesi dosen. Regulasi ini menetapkan ekuivalensi BKD (Beban Kerja Dosen) dan nilai tambah kinerja akademik bagi dosen yang terlibat dalam proyek terapan bersama industri.

- Tujuan: Memperbarui portofolio keahlian, keterampilan praktis, dan pemahaman teknis dosen internal mengenai dinamika operasional industri digital terkini.
- Dampak: Meningkatkan kualitas dan kedalaman materi pengajaran dosen internal, mendorong riset terapan berbasis kebutuhan industri, serta memberikan insentif karir akademis yang adil.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efekti-vitas	Efisi-ensi	Kecu-kupan	Eku-itas	Respon-sivitas	Kete-patan	Total Skor
1	Peraturan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pedoman Kemitraan Strategis dan *Co-Design Curriculum* Bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**27**
2	Peraturan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Standar Fleksibilitas Peninjauan Kurikulum dan Penerapan *Regulatory Sandbox* Akademik Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE)	4	5	4	4	4	5	26
3	Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran Terintegrasi Kerja (*Work-Integrated Learning*), Magang Terstruktur (*Co-Op Education*), dan	4	4	4	5	5	4	26

	Rekognisi Sertifikasi Profesi							
4	Peraturan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pedoman Program *Practitioner-to-Faculty* dan Skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik bagi Dosen Praktisi	4	3	3	4	4	3	21
5	Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pedoman Program *Industry Immersion* (Magang Industri) dan Insentif Ekuivalensi BKD bagi Dosen Pengampu	3	3	3	3	4	3	19

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor 1 (Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemitraan Strategis dan *Co-Design Curriculum* DUDI) mendapatkan total skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pesatnya perkembangan ekonomi digital menuntut perguruan tinggi untuk merespons ketidakselarasan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja (*skills mismatch*) yang berdampak pada tingginya angka pengangguran sarjana. Di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, permasalahan ini bersumber dari kurikulum yang terisolasi, siklus evaluasi yang birokratis, serta lemahnya payung hukum kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang cenderung berhenti pada komitmen formal (*paper-based agreement*).

Berdasarkan analisis prioritas masalah (USG) dan evaluasi kriteria kebijakan William N. Dunn, intervensi kebijakan tata kelola internal terbukti menjadi langkah paling efektif dan mendesak untuk mengatasi akar masalah tersebut. Penerbitan **Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemitraan Strategis dan *Co-Design Curriculum* Bersama DUDI** menjadi solusi kunci untuk memberikan kepastian hukum dan mandat operasional bagi program studi.

Melalui regulasi ini, kampus dapat memformalkan keterlibatan praktisi industri dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), menerapkan fleksibilitas kurikulum (*regulatory sandbox*), memfasilitasi pengakuan sertifikasi profesi, serta memberikan kepastian konversi SKS untuk magang terstruktur (*Co-Op Education*). Langkah strategis ini tidak hanya menjembatani jurang antara akademisi dan industri, tetapi juga secara langsung memperkuat daya saing serta keterserapan lulusan PTKI Siber di pasar kerja profesional.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis skoring alternatif kebijakan, direkomendasikan kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menerbitkan **Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemitraan Strategis dan *Co-Design Curriculum* Bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)** sebagai payung hukum internal yang mengikat di tingkat universitas, guna mewajibkan seluruh program studi menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah keahlian/terapan secara kolaboratif bersama praktisi DUDI dengan difasilitasi oleh Career Development Center (CDC), memformalkan skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang substantif, menjamin kesetaraan konversi SKS untuk magang terstruktur (Co-Op Education), serta mengintegrasikan penyetaraan sertifikasi profesi terstandar industri guna menghapus kesenjangan kompetensi digital (skills mismatch) dan meningkatkan daya saing lulusan secara berkelanjutan.

REFERENSI

Agustiningsih, Dwi. 2025. "Relevance of the Ministry of Religious Affairs' Religious Education Curriculum: Analysis of Knowledge, Skills, and Policy Implementation Gaps." *AMUYA: INDONESIAN JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS* 1(2):167–92. doi:10.61860/amuya.v1i2.17.

Alhloul, Abdelkarim, dan Eva Kiss. 2022. "Industry 4.0 as a Challenge for the Skills and Competencies of the Labor Force: A Bibliometric Review and a Survey." *Sci* 4(3):34. doi:10.3390/sci4030034.

Ardhana Januar Mahardhani, Bernadetha Nadeak, Ita Musfirowati Hanika, Izlan Sentryo, dan Rosmalina Kemala. 2023. "A New Approach to Curriculum Development: The Relevance of the Higher Education Curriculum to Industry Needs." *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)* 2(2):501–9. doi:10.55299/ijere.v2i2.620.

Ari Rizaludin. 2025. "Building A Collaborative Ecosystem: The Role of Higher Education Institutions, Industry, and Government in Enhancing Graduates' Employability." *International Seminar* 7:347–55. doi:10.36563/e8pexs76.

Aziz, Suudin, Sahri Sahri, dan Mohd Shahid Azim Bin Mohd Saufi. 2025. "Higher Education Strategic Partnership Management Model for the Independent Campus Internship." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(3):809–23. doi:10.33650/al-tanzim.v9i3.11079.

Baidowi, Ach., Syamsudin Syamsudin, dan Omar Khan. 2026. "Implementation of an Outcome-Based Education Curriculum in Improving the Competence of Graduates of the Islamic Education Management Study Program." *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 7(1):37–50. doi:10.54150/thawalib.v7i1.858.

Barreto, Daisyane, dan Sheri Conklin. 2025. "Mapping AECT Standards Framework: Implications for Instructional Technology programs." *Impacting Education: Journal on Transforming Professional Practice* 10(2). doi:10.5195/ie.2025.461.

Bhardwaj, Rajesh. 2026. "Bridging the Gap Between Academic Learning and Real-World Skills in Higher Education." *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 6(3):334–39. doi:10.55544/ijrah.6.3.45.

Bimala Putri, Delia Tamim, dan Hesti Putri. 2026. "The Velocity of Relevance: Mapping the Structural Divergence Between Labor Market Signals and University Curricula

in Indonesia via Text Mining and Network Analysis." *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 8(6):292–303. doi:10.37275/oaijss.v8i6.310.

Chemli, Samiha, Michail Toanoglou, dan Jose Luis Del Val Roman. 2024. "Skills Mismatch and Digital Skill Shortages in Tourism: Impact on Graduate Employment and Implications for Higher Education." *International Journal of Technology Enhanced Learning* 16(4):447–65. doi:10.1504/IJTEL.2024.141834.

Dalrymple, Angela. 2026. "Overcoming Collaboration Barriers in Work-Integrated Learning: A Framework for Employer–University Curriculum Partnership." *Higher Education, Skills and Work-Based Learning* 16(4):780–95. doi:10.1108/HESWBL-11-2025-0501.

Demartini, Maria Chiara, Daniela Quintanilla Segovia, Eugenia Parodi, Elisa Maccagni, Dmitrii Gribovskii, Sniazhana Diduc, Rumy Narayan, Adam Smale, Claire Stead, dan Federico Pigni. 2026. "Mapping Future Digital and Managerial Competencies: Aligning Emerging Technologies and HEI Curricula." Hlm. 1–3 dalam *2026 IEEE 5th International Conference on Intelligent Reality (ICIR)*. Pisa, Italy: IEEE.

Hambaly, Rubanto Sidi, Muhammad Akbar, dan Ni Luh Saddhwi Saraswati Adnyani. 2026. "Big Data Analysis of Skill Requirements in the Indonesian Manufacturing Sector: A Semantic Approach Using Large Language Models." *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri* 28(1):47–58. doi:10.9744/jti.28.1.47-58.

Hegde, Soumyashree, dan Pooja Kavade. 2025. "Bridging Skill Gap: A Study on Industry Expectations Vs. Graduate Competencies." *International Journal For Multidisciplinary Research* 7(3):44225. doi:10.36948/ijfmr.2025.v07i03.44225.

Hibbert, Kathryn. 2026. "Judging the Institution: Simulated Jurisprudence and the Governance of Professional Futures." *Policy Futures in Education* 24(4):520–39. doi:10.1177/14782103251386648.

Hidayati, Anis Ulil. 2026a. "Optimizing Link and Match Strategy between PTKN and the Industrial World to Improve Graduates' Job Readiness." *Amuya: Indonesian Journal of Management Reviews* 2(1):309–30. doi:10.61860/amuya.v2i1.46.

Hidayati, Anis Ulil. 2026b. "Optimizing Link and Match Strategy between PTKN and the Industrial World to Improve Graduates' Job Readiness." *Amuya: Indonesian Journal of Management Reviews* 2(1):309–30. doi:10.61860/amuya.v2i1.46.

Hsu, Amy, dan Fran Malkin. 2011. "Shifting The Focus From Teaching To Learning: Rethinking The Role Of The Teacher Educator." *Contemporary Issues in Education Research (CIER)* 4(12):43. doi:10.19030/cier.v4i12.6661.

Ika Rezki Purnama, Ariawan Ariawan, Ardhia Pramesti Regitha Mukminin, dan Andi Nur Azizah Fajry Azzahrah. 2026. "Human Capital Innovation dalam Menghadapi Skill Gap Tenaga Kerja Indonesia di Era Artificial Intelligence." *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 4(2):348–67. doi:10.61132/anggaran.v4i2.2484.

Mahalingam, Tamilselvan, Ahmed Ghonim, dan Minerva Bunagan. 2024. "A Curriculum Development Framework for Work Integrated Learning and Apprenticeships in Higher Education." Hlm. 118–23 dalam *2024 International Conference on TVET Excellence & Development (ICTeD)*. Melaka, Malaysia: IEEE.

Manalu, Andriono, Aprido B. Simamora, Ika Damayanti Purba, dan Renita Br. Perangin Angin. 2026. "Seminar Dan Workshop Perumusan Kurikulum Berbasis OBE (Outcome Based Education) di Sekolah Tinggi Diakones (STD) HKBP." *SAMBARA:*

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4(2):317–26. doi:10.58540/sambarapkm.v4i2.1682.

Muhammad Zahdi Husaini dan Asmiati. 2026. "Analisis Kebijakan Kurikulum dan Relevansinya dengan Kebutuhan Dunia Industri." *QOUBA : Jurnal Pendidikan* 3(1):505–15. doi:10.61104/qb.v3i1.1161.

Murni, Astuti. 2024. "Implementasi Kurikulum Merdeka Program Magang Bersertifikat di Era Digital pada Departemen Tata Rias Dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang." *The Indonesian Journal of Computer Science* 13(4). doi:10.33022/ijcs.v13i4.4108.

Nandini Tandon. 2024. "Importance of Triple Helix in Building Knowledge Economy: A Systematic Literature Review." *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology* 45(04):3491–3503. doi:10.52783/tjjpt.v45.i04.9229.

Nesa Novrizal dan Rio Ravi Muhammad. 2025. "Design Curriculum Based on Outcome Based Education (OBE): Preparing Work Ready Graduates." *Edukasiana: Journal of Islamic Education* 4(1):374–84. doi:10.61159/edukasiana.v4i1.385.

Palacios Fenech, Javier, Sara Fontdecaba Rigat, Eva Olmedo, dan María Sanz Vicente. 2026. "Evaluating Project-Based Learning in Real-World Business Challenges: The Role of Problem Definition and Mentoring in University–Industry Collaboration." *Higher Education, Skills and Work-Based Learning* 1–24. doi:10.1108/HESWBL-09-2025-0396.

Pepilina, Dini. 2025. "Collaboration Model between PTKI and DUDI for Quality and Equality in Education 2045." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 6(3):691–709. doi:10.37680/scaffolding.v6i3.8309.

Poniman, Rifki Aditia Novaldi, Hanifa Intan Desiga, dan Natasha. 2026. "Skill Gap Analysis of Human Resources Between Higher Education and the Workforce in Bangka Belitung Province." *Psychological Research and Intervention* 8(1):47–55. doi:10.21831/pri.v8i1.91008.

Pratiwi, Helda, Mulyaningsih Ariyani, Mika Elisa, dan Musaddad Harahap. 2024. "Literasi Digital Sebagai Inovasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Muta'allimin* 1(2):79–92. doi:10.25299/jpim.2024.19628.

Putra, Arya Rio Pratama, Muhamad Aldi Triwijaya, Raehan Langitan, Safwan Zacky Fianto, dan Rudianto Rudianto. 2026. "Analisis Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dan Fenomena Mismatch Pekerjaan Dengan Jurusan di Indonesia: Analysis of the Relationship Between Unemployment Rates and Job Mismatch Phenomena with Majors in Indonesia." *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi* 2(4):762–70. doi:10.63921/jmaeka.v2i4.496.

Rasmawar, Rasmawar, R. Madhakomala, dan Linda Ika Mayasari. 2026. "Industry-Based Curriculum and Graduate Employability: An Effort to Reduce Intellectual Unemployment." *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 4(02):100–112. doi:10.58812/spp.v4i02.825.

Rianto, Joko, Mustofa Kamil, Walla Astianty Putry, dan Saepul Bahri. 2022a. "The Relevance of the Higher Education Curriculum in the Development of the World of Work and the Industrial Sector: The Case of Universitas Islam Syekh-Yusuf." *Society* 10(1):110–25. doi:10.33019/society.v10i1.408.

Rianto, Joko, Mustofa Kamil, Walla Astianty Putry, dan Saepul Bahri. 2022b. "The Relevance of the Higher Education Curriculum in the Development of the World of

Work and the Industrial Sector: The Case of Universitas Islam Syekh-Yusuf." *Society* 10(1):110–25. doi:10.33019/society.v10i1.408.

S. Yu. Witte Moscow University, Moscow, Russia, dan Dmitry S. Pridantsev. 2023. "Development of Public-Private Partnership in Education." *Ekonomika I Upravlenie: Problemy, Resheniya* 5/1(137):161–64. doi:10.36871/ek.up.p.r.2023.05.01.017.

Saquin, Melona I. 2023. "Curriculum Relevance on Graduate Career: A Tracer Study of the Graduates of Cavite State Universitytanza Campus." *International Journal of Research in Education Humanities and Commerce* 04(04):64–73. doi:10.37602/IJREHC.2023.4407.

Setiadi, Farisya, Muhaemin, Albaar Rubhasy, Eko K. Budiardjo, dan Zainal A. Hasibuan. 2025. "A Conceptual Framework for Digital Competency Development and Alignment in Higher Education." Hlm. 1–6 dalam *2025 Tenth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*. Lampung, Indonesia: IEEE.

Shibani, Antonette, dan Adrian Buck. 2022. "Designing Effective Work-Integrated Learning for Data Science Students: Considerations and Lessons Learned." *ASCILITE Publications* e22135. doi:10.14742/apubs.2022.135.

Shrivastava, Samir, Anne Bardoel, Nikola Djurkovic, Timothy Plueckhahn, dan Diana Rajendran. 2020. "Co-Creating Curricula with Industry Partners: A Case Study." *Academy of Management Proceedings* 2020(1):18132. doi:10.5465/AMBPP.2020.18132abstract.

Sulistiawan, Jovi. 2025. "Mapping Employability: A Decade of Trends and Insights from Higher Education through Bibliometric Analysis (2014–2024)." *Global Knowledge, Memory and Communication*. doi:10.1108/GKMC-06-2024-0394.

Supendi. 2025. "A Path to Job-Ready Graduates: The Urgency of Curriculum Regulation to Overcome the Competency Gap at State Islamic University (UIN) Jurai Siwo Lampung." *Amuya: Indonesian Journal of Management Reviews* 1(2):365–88. doi:10.61860/amuya.v1i2.25.

Taffe, Simone, Sonja Pedell, dan Andrea Wilkinson. 2018. "Reimagining Ageing: Insights from Teaching Co-Design Methods with Designers, Seniors and Industry Partners." *Design for Health* 2(1):107–16. doi:10.1080/24735132.2018.1450945.

Taufik, Opik Abdurrahman, dan Suprapto Suprapto. 2021. "Mewujudkan Lulusan Prodi PAI Berkompeten Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja." *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)* 31(1):57. doi:10.24235/ath.v31i1.8468.

Warsaw University of Technology, dan Katarzyna Chojecka. 2025. "Cybersecurity, Resilience and Sustainability: Evaluating The Role of Public-Private Partnerships." *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies* 18(32):39–55. doi:10.7172/1689-9024.YARS.2025.18.32.9.